

Propam Telah Periksa Polisi terkait Penembakan 6 Anggota Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Divisi Profesi dan Pengalaman (Propam) Polri telah memeriksa anggota Polda Metro Jaya terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Informasi ini disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Sayangnya, Kombes Ahmad Ramadhan tak merinci detail berapa jumlah polisi yang diperiksa dan identitas aparat tersebut.

"Tentunya sudah (diminta keterangan)," kata Ahmad dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/1).

Terkait dengan pengawasan internal yang dilakukan Propam Polri, Ahmad mengungkapkan bahwa, pihaknya terus melakukan pendalaman dan mencocokkan temuan di lapangan.

"Pihak Propam tentunya terus berkoordinasi, dan kini sedang pendalaman Propam tengah mencocokkan temuan di lapangan, baik temuan di lakukan Kompolnas maupun Komnas HAM," ujar Ahmad. Ahmad mengatakan bahwa sejauh ini belum ada hasil yang didapat dari penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh Propam Polri tersebut.

Sebelumnya, Divisi Propam Polri melakukan pengawasan dan investigasi terkait dengan keputusan anggota Polda Metro Jaya yang membela diri dengan berujung penembakan terha-

dap enam Laskar FPI yang melakukan penyerangan ke aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek.

Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyebut, terkait dengan keputusan bela diri anggota polisi dalam kasus itu, pihaknya akan mendalami apakah penggunaan kekuatan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 dan 8 Tahun 2009.

"Pengawasan terhadap tindakan kepolisian dalam kasus penyerangan anggota FPI terhadap anggota Polri.

Akibat penyerangan itu, ada tindakan kepolisian yang menyebabkan penyerang meninggal dunia," kata Ferdy saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (9/12) tahun lalu.

Menurut Ferdy, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Sementara Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Yang kami lakukan pengawasan, apakah sudah sesuai dengan Perkap terkait penggunaan kekuatan.

Kalau sesuai penggunaan kekuatannya berdasarkan Perkap, akan disampaikan secara transparan," ujar Ferdy. • lus

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif Diperiksa Terkait Aksi 1812

JAKARTA (IM) - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menyangkan pemanggilan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif oleh Polda Metro Jaya. Slamet dipanggil sebagai saksi terkait aksi bertajuk 1812.

"Tidak seharusnya USM (Ustads Slamet Ma'arif) itu dipanggil karena jelas aksi 1812 dilindungi UUD 45 Pasal 28E serta UU No 9 Tahun 1998 serta dilindungi HAM dan UU tersebut di atas UU Karantina dan memang tidak ada korelasinya," ujar Novel saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/1).

Bahkan, Novel menginginkan agar pemeriksaan Slamet hanya dilakukan sekali saja. Kemudian, selanjutnya pun tidak perlu dipanggil lagi. "Dan saya berharap pemeriksaan terhadap USM tidak lanjut karena aksi kemarin tidak ada karena sudah dibubarkan paksa," tuturnya.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif datang Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait aksi bertajuk 1812. "Saya peserta dan saya belum hadir sudah dibubarkan terlebih dahulu. Saya dipanggil sebagai saksi tapi saya belum tahu saksi untuk siapa karena di situ enggak disebutkan saksi untuk siapanya," katanya di Polda Metro Jaya. Slamet yang datang sekira pukul 10.30 WIB didampingi kuasa hukumnya dengan memakai gamis. Dari surat panggilan yang diterimanya juga tidak diberitahukan kalau diperiksa sebagai saksi untuk siapa dan kapasitasnya sebagai apa.

Maklumat Kapolri

Polri menyatakan sampai saat ini belum melakukan penindakan terkait dengan Maklumat Kapolri bernomor Mak/1/1/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), utamanya pada poin 2d, tidak melarang media untuk memberikannya.

"Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyanggung media, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," kata Argo melalui keterangan resminya, Minggu 3 Januari 2021.

Argo menjelaskan, yang dimaksud dalam poin 2d tersebut yakni, simbol atau atribut FPI dilarang digunakan dan diproduksi untuk kepentingan adu domba, provokasi, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. • lus

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



VAKSIN COVID-19 SINOVAC TIBA DI LAMPUNG

Anggota Brimob berjaga di samping truk berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya di UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Lampung, Senin (4/12). Sebanyak 40.520 ribu dosis vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Lampung dan disimpan di ruang khusus di UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.



VAKSIN COVID-19 TIBA DI JAWA TENGAH

Petugas memindahkan boks berisi vaksin Covid-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/12) dini hari. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021

Moeldoko: Pengumuman Calon Kapolri Tinggal Menunggu Waktu

Ada beberapa perwira tinggi Polri bintang 3 dan bintang 2 yang potensial mengisi jabatan Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pengumuman calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis tinggal menunggu waktu. "Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1).

Sayangnya, Moeldoko masih enggan mengungkap calon

kapolri yang namanya sudah ada di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kebetulan tidak di kantong saya, kan begitu," ujarnya. Moeldoko lebih lanjut mengatakan bahwa mekanisme penggantian kapolri sudah jelas. Presiden akan mengusulkan nama calon ke Komisi III DPR RI. Selanjutnya, DPR akan menggelar uji kelayakan dan

kepatutan sebelum nantinya mengambil keputusan tentang calon yang dipilih. Oleh karena itu, kata Moeldoko, perihalnya nama calon kapolri bakal disampaikan di akhir.

"Saya pikir sampai di situ saja, nanti nama belakangan, gampang," katanya.

Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021. Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh sebelumnya memperkirakan bahwa Presiden Jokowi akan mengiriskan surat presiden (surpres) terkait nama calon Kapolri pada pertengahan Januari 2021 atau setelah masa reses DPR berakhir pada 10 Januari 2021.

"Kita perkirakan surat

Bapak Presiden itu mungkin pertengahan (Januari), karena kita masih reses ini. Nanti tanggal 10 kita berakir reses, tanggal 11 masuk," kata Pangeran saat dihubungi, Jumat (1/1) lalu.

Terkait kandidat calon Kapolri yang berpeluang menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis, kata dia, ada beberapa perwira tinggi Polri bintang 3 dan bintang 2 yang potensial mengisi jabatan Kapolri.

"Semuanya itu nantinya terserah presiden.

Jadi ada beberapa jenderal bintang tiga yang potensial, bintang dua yang nanti bakal naik jadi bintang tiga juga potensial," katanya.

Moeldoko sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi punya kunci sendiri untuk menentukan calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis pada awal 2021.

"Presiden juga punya kunci

sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat," kata Moeldoko. Ia pun tak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana telah mengantongi tiga nama calon Kapolri Moeldoko tak memfasilahkan jika masyarakat berspekulasi terkait hal ini. Ia menyebut, publik punya hak untuk berkalkulasi.

"Biarkan masyarakat berspekulasi, biarlah masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menilai, terdapat lima dari

13 komisaris jenderal (komjen) atau jenderal polisi berbintang tiga yang berpeluang menjadi Kapolri pengganti Idham Azis. Pada awal 2021, Idham akan mengakhiri masa jabatannya.

Lima nama yang berpotensi besar, menurut Neta, adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Komjen Andap Budi Revianto.

Nama berikutnya adalah mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komjen Rycko Amelza Dahniel, yang kini menjabat sebagai Kabaintelkam. Selanjutnya, bakal ada dua jenderal berbintang dua atau inspektur jenderal (irjen) yang berpotensi naik pangkat menjadi komjen sehingga turut memiliki peluang menjadi Kapolri.

Menurut Neta, sejumlah jenderal berbintang dua yang berpotensi mengisi dua jabatan itu antara lain Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri, Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendy, dan Koorsahli Kapolri Irjen Nana Sudjana. Nana sebelumnya dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya karena dinilai lalai dalam mengakkan protokol kesehatan Covid-19.

Meski begitu, Neta menilai Nana tetap memiliki peluang masuk dalam bursa calon Kapolri. • lus

Polri Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening FPI Pasca-Dibubarkan

JAKARTA (IM) - Rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) diklaim telah diblokir pasca dilarang beraktivitas dan dibubarkan oleh pemerintah.

Polri menyatakan tidak terlibat dan tidak tahu soal pemblokiran rekening FPI. Alasannya, pemblokiran bukanlah kewenangan Polri. Selain itu, polisi juga belum mendapatkan informasi utuh terkait dengan hal tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar tak membantah adanya kabar pemblokiran rekening bank dari FPI tersebut. "Infonya begitu, tapi nanti kami cek untuk pastikan lagi," kata Yanuar saat dikonfirmasi terpisah.

Aziz menambahkan, pihaknya belum berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak bank lantaran saat ini tengah libur tahun baru 2021.

"Bank masih libur juga," ucapnya.

Diperiksa Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) di Rutan Polda Metro Jaya, terkait dengan kasus dugaan pidana menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular terkait pengambilan uji

Swab Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor, Jawa Barat.

"Hari ini pemeriksaan Rizieq sebagai saksi dalam kasus RS Ummi," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (4/1).

Selain Rizieq, penyidik sebetulnya menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Dirut RS Ummi. Namun, lantaran yang bersangkutan masih terpapar Covid-19, sehingga agenda tersebut diurungkan. "Ada 1 terlapor yang belum bisa diperiksa karena masih Covid," ujar Andi.

Dalam hal ini, RS Ummi dilaporkan dengan nomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. Adapun pasal yang disangkakan yakni Pasal 14 Ayat 1, 2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Dalam laporannya, RS Ummi diduga menghalangi atau menagkan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 yang akan melakukan swab tes terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar Covid-19.

RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut. • lus



PANEN IKAN BANDENG DI KAMPUNG TANGGUH COVID-19

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto (tengah) didampingi Wakilpolres AKBP Yudhistira Midhyawan (kiri) dan sejumlah tokoh masyarakat melakukan panen raya ikan bandeng di empang garapan warga Kampung Tangguh Covid-19 binaan Polres Metro Tangerang Kota di Teluk Naga, Tangerang, Banten, Senin (4/1). Sebanyak 4 ton ikan bandeng berhasil dipanen warga, yang hasilnya akan dibagikan kepada warga sekitar terdampak Covid-19.

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan
Lowongan Kerja 职位空缺
MARKETING FREELANCE
Syarat :
● Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
● Penampilan Menarik dan Rapi
● Orientasi Target dan Komisi
● Minimal Lulusan SMA / Sederajat
● Berpengalaman di bidang Marketing
● Domisili Medan - Sumatera Utara
Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com